

# **UPAYA PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM MEMBINA MASYARAKAT TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH PERKOTAAN TAHUN 2020-2022**

**Oleh : Arya Amelia Anjani**

**Pembimbing : : Adlin, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL. H. R. Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

TELP/Fax. 0761-63277

## **ABSTRACT**

*Due to the low participation of the community in government policies in an effort to reduce the impact of the waste phenomenon in accordance with the Batam City Regional Regulation No. 11 of 2013. One of the environmental problems what is a frightening specter for the community is the waste problem. Rubbish which is always produced every day, especially in Indonesia which has a large amount waste continues to increase from year to year because it has not been properly managed good and appropriate. The government is required to establish targeted policies as an effort to develop the community in waste management. Certainly, it will work if the community is willing to carry out every policy made and able to follow the warnings issued by the local government. This research aims to describe the efforts of the Batam City Environmental Service in fostering the community regarding waste problems and how the forms of activity are presented to the community to bridge the creation of environmental cleanliness. The research method used is a qualitative method by explaining descriptive data. The type of research data used is primary in the form of data obtained from research informants and secondary in the form of data obtained from related documents. Then, the research location is at the Batam City Environmental Service Office.*

*This research found that with good cooperation between the government and the community, the success of the policy has been established. Among the programs created by DLH Batam City in the framework of fostering the community are the program to sort waste from home, regular waste weighing, socialization and environmental campaigns, and a waste bank. However, there are still elements that have not been implemented optimally, namely the lack of direct supervision by the government in charge of monitoring the locations where coaching is carried out. However, there are still elements that have not been implemented optimally that needs direct supervision by the government authorized to monitor locations where coaching is carried out which is a thing crucial to measure how far the policies made are capable to develop a sense of community concern for the environment.*

*Keywords: Guidance by the Government, Authority, Policy Success*

## PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting untuk mencapai sebuah keberhasilan dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dapat ditunjukkan pada program-program yang dihadirkan pemerintah untuk masyarakat. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu isu strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adil. Hal tersebut merupakan salah satu kondisi yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berhasil dengan baik. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi, maka berbagai kebijakan perbaikan lingkungan hidup akan dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat luas. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan (Batamos, 2021).

Namun sebenarnya antusias masyarakat di Kota Batam masih rendah. Dampak dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tersebut mengakibatkan beberapa program belum terlaksana dengan baik, diantaranya adanya proses pengembangan Bank Sampah yang belum terlaksana dengan baik serta pemantauan timbulan sampah dan pengawasan lingkungan tempat tumpukan sampah berasal. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut akan berakibat pada berbagai faktor termasuk tidak berjalannya pemanfaatan hasil pembuangan. Pemanfaatan hasil pembuangan merupakan peran untuk me-

reuse, me-recycle dan me-reduce hasil dari pembuangan. Maka kebijakan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat merupakan sebuah bentuk dari tata kelola pemerintahan yang baik. Karena hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk memelihara, merawat, dan mengolah hasil pembuangan yang diperoleh dari kemauan masyarakat itu sendiri. Tetapi jika kesadaran tersebut bukan dari masyarakat dan bukan berasal dari aspirasi masyarakat akan menyebabkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menjadi rendah, hal tersebut dapat mengakibatkan hasil dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menjadi tidak berjalan. Artinya program yang dilaksanakan tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

Maka dalam rangka menumbuhkan kepedulian masyarakat terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban dari pemerintah untuk masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum berbentuk Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah yang sudah efektif dilaksanakan sejak tahun 2016. Dijelaskan pada Pasal 9 ayat 3, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembinaan agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara:

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;

b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang kebersihan lingkungan;

c. menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan persampahan;

d. menumbuhkembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas; dan

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan hasil pengelolaan sampah;

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan sebab secara prinsip penyelenggaraan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah bersangkutan. Konsepsi partisipasi masyarakat secara langsung terkait dengan ide demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi yaitu “dari, oleh dan untuk rakyat”, yang nantinya akan: “memberikan pada setiap warga negara kemungkinan untuk menaiki jenjang skala sosial dan dengan demikian menurut hukum membuka jalan bagi hak-hak masyarakat untuk meniadakan semua hak istimewa yang dibawa sejak lahir, serta menginginkan agar perjuangan demi keunggulan dalam masyarakat ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang”.

Dikutip dari laman Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Batam, program pembinaan masyarakat yang sudah dijalankan mencakup sosialisasi kebersihan, pelaksanaan bank

sampah masyarakat, penyelenggaraan pengelolaan sampah masarakat dari rumah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

**Tabel 1.2 Laporan Pemilahan Sampah Berdasarkan Kategori Sampah pada Bank Sampah Tahun 2021**

No	Bulan	Pemilahan Jenis Sampah (ton)				Total
		Plastic	Kertas	Kaleng/ ng/ Besi	Botol	
1	Januari	2.24	4.04	0.42	0	6.71
2	Februari	2.50	5.27	0.62	0	8.39
3	Maret	2.29	4.88	0.57	0	7.74
4	April	1.62	7.09	0.37	0	9.08
5	Mei	1.08	2.62	0.39	0	4.10
6	Juni	3.76	9.34	1.70	0	14.80
7	<b>Total</b>	<b>13.49</b>	<b>33.24</b>	<b>4.07</b>	<b>0</b>	<b>50.80</b>
8	<b>Rata-rata perbulan</b>	2.25	5.54	0.68	0	8.47

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2021

Berdasarkan tabel diatas sampah yang paling banyak terpilah di tahun 2021 hingga bulan juni melalui bank sampah unit di seluruh kota batam yaitu sampah kertas yang berjumlah 33,24 ton, dimana rata-rata per bulannya ialah sebesar 5,54 ton. Sedangkan sampah yang paling sedikit terpilah adalah sampah yang bermaterial dari kaleng/besi berjumlah sebesar 0.07 ton. Rata-rata sampah yang terpilah melalui bank sampah ialah 4,07 ton dimana rata-rata perbulannya bersikasar sebesar 0,68 ton.

Maka untuk penelitian ini penulis mengambil sampel di Kota Batam untuk melihat upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam rangka membina masyarakatnya Alasan Kota Batam ini dipilih karena Kota Batam merupakan kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki berbagai

macam variasi manusia disebabkan penduduknya yang heterogen berasal dari berbagai penjuru negeri, sehingga sangat menarik untuk diteliti yaitu untuk melihat pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam tersebut terhadap masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan fenomena-fenomena diatas, maka sangat perlu untuk dilakukan penelitian dalam hal mengetahui pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Serta bagaimana pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam kepada masyarakat terkait pengelolaan persampahan lingkup perkotaan di Kota Batam?

## **A. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Konsep Pembinaan**

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab

dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya di dasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat ditetapkan dalam praktek.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses initerkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Menurut Poerwadarmita (2012), pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Miftha Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau

pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:

- a. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan
- b. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

#### **b. Indikator Pembinaan**

##### **i. Kesadaran**

Kesadaran secara bahasa berasal dari kata “sadar” yang berarti merasa, tahu, dan ingat (kepada keadaan yang sebenarnya) atau keadaan ingat (tahu) akan dirinya. Antonio Gramsci, menyatakan bahwa kesadaran merupakan kondisi di mana kita memahami situasi dan kondisi watak masyarakat di mana kita hidup.

##### **ii. Ketaatan**

Ketaatan merupakan hasil akhir dari perubahan perilaku yang dimulai dari peningkatan pengetahuan, setelah seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentang sesuatu maka akan merubah sikap orang tersebut terhadap pengetahuan yang baru dimilikinya dan selanjutnya seseorang akan merubah perilakunya, dan dalam merubah perilakunya seseorang terlebih dahulu menilai manfaat yang akan didapatkan (Notoatmodjo, 2003 dalam Silvia, 2012).

##### **iii. Keterampilan**

Menurut Soemarjadi keterampilan merupakan perilaku yang diperoleh melalui tahap-tahap belajar, keterampilan berasal dari gerakan-

gerakan yang kasar atau tidak terkoordinasi melalui pelatihan bertahap gerakan tidak teratur itu berangsur-angsur berubah menjadi gerakan-gerakan yang lebih halus, melalui proses koordinasi diskriminasi (perbedaan) dan integrasi (perpaduan) sehingga diperoleh suatu keterampilan yang diperlukan untuk tujuan tertentu.

##### **iv. Keamanan**

Keamanan berasal dari kata pokok “aman” yang berarti bebas, terindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan “keamanan” memiliki arti “suasana aman” ketentraman, ketenangan (Peter Salim, 2002). Pengertian keamanan secara umum adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun psikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya (Awaloedin Djamin, 2004).

#### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Pemerintah Kota Batam dalam Membina Masyarakat Terkait Pengelolaan Sampah Wilayah Perkotaan Tahun 2020-2022**

##### **1. Kesadaran**

##### **Membangun Kesadaran Pilah Sampah Dari Rumah**

Gerakan Pilah Sampah dari Rumah merupakan upaya pemerintah Kota Batam dalam mengurangi sampah dan mendukung peningkatan perbaikan tata

kelola sampah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Diharapkan dengan program ini akan ada peningkatan untuk menggunakan ulang, mengurangi, dan mendaur ulang sampah yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pilah sampah dapat mendorong sirkular ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya nilai dan kualitas, maka sampah bisa menjadi barang yang berguna dan mendorong terciptanya industri. Hal tersebut akan membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti terciptanya lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan keterampilan dan juga kemampuan masyarakat. Program kerja Pilah Sampah dari Rumah ini berisikan informasi yang berkaitan dengan upaya pengelolaan sampah tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Batam dengan topik yang diangkat diantaranya tentang bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga dan jenis jenis sampah rumah tangga serta pembagiannya. DLHK Kota Batam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya meningkatkan kesadaran tentang pemilahan sampah. Sampah yang tidak dipilah tidak dapat diolah akibatnya sampah anorganik yang seharusnya masih bisa didaur ulang terbuang sia-sia. Pembusukan sisa sayur menghasilkan gas metan yang sangat berbahaya, air lindinya mengandung logam mulia. Setelah masyarakat mendapatkan informasi tentang kategori sampah dan cara penanganannya, masyarakat diajak untuk menerapkan penanganan sampah melalui cara pemilahan sampah. Timbulan sampah rumah tangga milik masyarakat dikumpulkan bersama kemudian dipilah bersama. Untuk pemilahan masyarakat didampingi oleh tim lapangan DLH Kota Batam untuk memilah sampah. Hasil

pemilahan dikategorisasikan dalam sampah anorganik bernilai yang kemudian dititipkan ke Bank Sampah dan sampah residu yang kemudian di buang dibuang ke TPA. Evaluasi berupa diskusi bersama tim lapangan DLH Kota Batam dilakukan untuk melihat partisipasi warga dalam pemilahan sampah.

**Gambar 3. 1 Sosialisasi Program Pilah Sampah dari Rumah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

## **2. Ketaatan Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat**

Pengawasan yang berkesinambungan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya

mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sedangkan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH definisi Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

**Gambar 3. 2 Pengawasan disekitaran Kantor DLH Kota Batam oleh Tim Yustisi Pengawasan dan Kebersihan**



*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2021*

Dapat dilihat pada gambar diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam turun langsung ketempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat menumpuknya sampah. Pengawasan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian DLH terhadap masyarakat dan lingkungan setempat dengan menegur serta mengedukasi orang-orang yang hendak membuang sampah sembarangan ditempat yang tidak seharusnya. Adanya upaya pencegahan, penanggulangan kerusakan, hingga pemulihan kualitas lingkungan pada hakikatnya merupakan dorongan perangkat kebijakan untuk program yang bersifat interdependensi. Sesuai dengan hal itu, pemerintah pusat melalui KLHK RI memngadakan program unggulan berupa kegiatan pengawasan pengendalian yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar taat terhadap peraturan lingkungan hidup. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan, karena dengan adanya pengawasan maka

perencanaan yang diharapkan oleh pemerintah dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Proses ini adalah kegiatan pengamatan terhadap keseluruhan proses dari kebijakan yang sedang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang nantinya digunakan sebagai tolak ukur berjalan sesuai dengan rencana atau tidaknya suatu kebijakan.

### 3. Keterampilan

#### **Pengembangan Keterampilan Masyarakat**

Proyeksi pertumbuhan masyarakat di Kota Batam merupakan hal yang semestinya menjadi perhatian penuh dari berbagai pihak khususnya pemerintah. Pertumbuhan yang besar ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan lingkungan yang ditengarai oleh tidak pedulinya masyarakat pada lingkungan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat dimanfaatkan kearah yang lebih berguna dengan pola pemberdayaan (*empowering*) atau belajar kecakapan hidup (*life skills education*). Masyarakat diberikan suatu pelatihan agar bisa memberi penghasilan untuk kehidupannya agar dapat membiayai kehidupan keluarganya, khususnya anak-anak yang membutuhkan dana untuk biaya sekolah. Anak-anak dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah juga perlu diberdayakan misalnya dengan memberikan pendampingan dan pelatihan keterampilan agar mereka bisa menghasilkan sesuatu karya dan menambah penghasilan keluarga.

Oleh sebab itu, dalam rangka mengembangkan keterampilan masyarakat serta mengurangi penumpukan sampah anorganik, DLH Kota Batam mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang berminat untuk mengembangkan kreativitasnya. Melalui

Bank Sampah Kota Batam, sampah-sampah yang masih bernilai dan bisa dimanfaatkan dijadikan suatu kerajinan tangan bernilai jual untuk nantinya masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari produk yang mereka ciptakan.

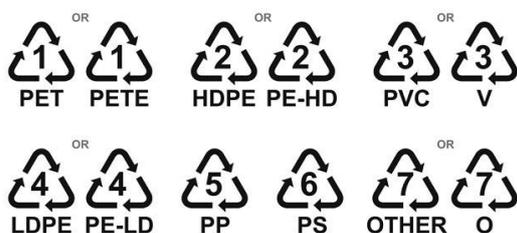
Lingkungan yang bersih dan sehat akan menguatkan inisiatif masyarakat dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan. Manfaat lainnya dengan adanya kemampuan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah juga akan sangat tergantung kepada pendapatan masyarakat. Salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Prinsip 3R adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Langkah utama adalah penilihan sejak dari sumber.

Menurut Environmental Services Program kunci keberhasilan program kebersihan dan pengelolaan sampah terletak pada pemilihan. Tanpa pemilihan pengolahan sampah menjadi sulit, mahal dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan (Sulistiyorini, Darwis, & Gutama 2015). Konsep pengembangan masyarakat (*Community Development*) sebenarnya adalah pengorganisasian masyarakat (*Community Organization*), yang bermakna mengorganisasikan masyarakat sebagai sebuah sistem untuk melayani warganya dalam setting kondisi yang berubah. Dengan demikian inti pengertiannya adalah mendorong warga masyarakat untuk mengorganisasikan diri

untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kesejahteraannya sendiri (Wibhawa, Raharjo, & Budiarti, 2010).

Menurut (Nabila & Yuniningsih, 2016) terdapat dua jenis partisipasi menurut Midgley, yaitu *Authentic Participation* atau Partisipasi Otentik, dan *Pseudo Participation* atau Partisipasi Semu. Terdapat tiga kriteria dalam partisipasi otentik yaitu sumbangsih warga terhadap program, keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, dan penerimaan manfaat program secara merata. Apabila salah satu dari tiga kriteria tersebut tidak dapat terpenuhi, maka bentuk partisipasinya adalah *Pseudo Participation* atau partisipasi semu. Untuk dapat mengurangi tumpukan sampah plastik akibat penggunaan yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengolah sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai manfaat lainnya. Dalam usaha mengurangi sampah plastik dengan melakukan daur ulang sampah plastik maka perlu mengenal jenis-jenis plastik yang berada di pasaran. Berdasarkan American Society of Plastic Industry, telah dibentuk system pengkodean resin untuk plastik yang dapat di daur ulang (recycle). Kode atau simbol tersebut berbentuk segitiga arah panah yang merupakan simbol daur ulang dan di dalamnya terdapat nomor yang merupakan kode dan resin yang dapat di daur ulang seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3. 3 Kode Jenis Plastik



Sumber : Wikipedia

Keterangan:

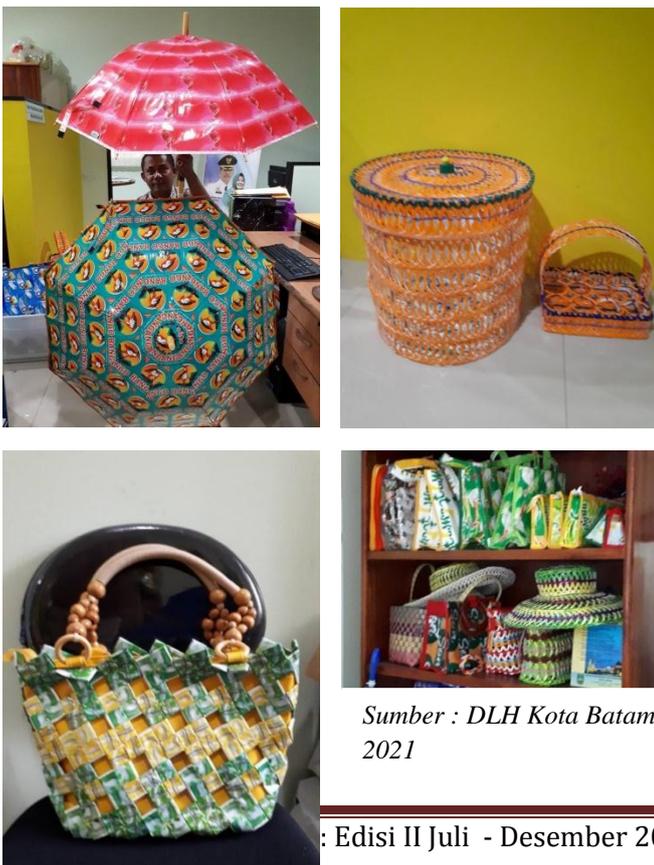
- a) PET atau PETE, atau *polyethylene terephthalate*. Ringan, murah, dan mudah membuatnya. Penggunaannya terutama pada botol minuman soft drink, tempat makanan yang tahan microwave dan lain-lain.
- b) HDPE (*high density polyethylene*)  
Lebih kuat dan rentan terhadap korosi, sedikit sekali resiko penyebaran kimia bila digunakan sebagai wadah makanan, bisa digunakan untuk wadah sampo, deterjen, kantong sampah. Mudah didaur ulang.
- c) PVC (*polyvinyl chloride*)  
Plastik jenis ini memiliki karakteristik fisik yang stabil dan memiliki ketahanan terhadap bahan kimia, cuaca, sifat elektrik dan aliran. Bahan ini paling sulit didaur ulang dan paling sering kita jumpai penggunaannya pada pipa dan konstruksi bangunan.
- d) LDPE (*low density polyethylene*)  
Bisa digunakan untuk wadah makanan dan botolbotol yang lebih lembek.
- e) PP (*polypropylene*)  
Plastik jenis ini mempunyai sifat tahan terhadap kimia kecuali klorin, bahan bakar dan xylene, mempunyai sifat insulasi listrik yang baik. Bahan ini juga tahan terhadap air mendidih dan sterilisasi dengan uap panas. Aplikasinya pada komponen otomotif, tempat makanan, karpet, dll.

f) PS (*polystyrene*)

Jenis ini mempunyai kekakuan dan kestabilan dimensi yang baik. Biasanya digunakan untuk wadah makanan sekali pakai, kemasan, mainan, peralatan medis, dan lain-lain (Purwaningrum 2016).

Pengelolaan sampah plastik dengan cara mendaur ulang sampah plastik menjadi bentuk lain, namun proses daur ulang ini hanya akan merubah sampah plastik menjadi bentuk baru bukan menanggulangi volume sampah plastik sehingga ketika produk daur ulang plastik sudah kehilangan fungsinya maka akan kembali menjadi sampah plastik (Wahyudi, Prayitno, & Astuti, 2018). Oleh karenanya diperlukan alternatif lain untuk menangani volume sampah plastik ini. Salah satu alternatif penanganan sampah plastik adalah dengan melakukan proses daur ulang (*recycle*).

**Gambar 3. 4 Hasil Kerajinan Tangan Masyarakat dari Bank Sampah Kota Batam**



Sumber : DLH Kota Batam 2021

Proses daur ulang merupakan pengolahan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi, atau keduanya sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan kembali. Daur ulang (*recycle*) sampah plastik dapat dibedakan menjadi empat cara yaitu daur ulang primer, daur ulang sekunder, daur ulang tersier, dan daur ulang quarter. Daur ulang primer adalah daur ulang limbah plastik menjadi produk yang memiliki kualitas yang hampir setara dengan produk aslinya. Daur ulang cara ini dapat dilakukan pada sampah plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan material lain dan terdiri dari satu jenis plastik saja. Daur ulang sekunder adalah daur ulang yang menghasilkan produk yang sejenis dengan produk aslinya tetapi dengan kualitas dibawahnya. Daur ulang tersier adalah daur ulang sampah plastik menjadi bahan kimia atau menjadi bahan bakar. Daur ulang quarter adalah proses untuk mendapatkan energi yang terkandung di dalam sampah plastik (Surono, 2013).

Dalam kegiatan pendampingan pelatihan mengolah sampah plastik dari botol minuman bekas ini termasuk ke dalam jenis daur ulang primer. Pada tahap persiapan yang perlu dilakukan adalah memilih jenis komoditas sampah plastik yang akan diolah. Setelah memisahkan jenis kemasan plastik yang akan didaur ulang yaitu yang dalam upaya mengurangi konsumsi plastik harus berhadapan dengan aspek sosial budaya masyarakat yang belum dapat beralih dari plastik, selain kesadaran lingkungan yang harus terus dipupuk. Peran pemerintah menjadi penting untuk mengedukasi masyarakat supaya dapat memilah sampah dan mengurangi perilaku menyampah,

meningkatkan kapasitas Bank Sampah, mengelola pemulung dan pengepul, membangun kerjasama antara dua pihak tersebut, serta melakukan pengolahan akhir untuk sampah-sampah yang sudah tidak dapat diolah lagi oleh Bank Sampah dan pengepul (Septiani et al, 2019).

**Gambar 3. 5 Pendampingan Pengelolaan Sampah Menjadi Barang Layak Guna oleh Ibu Rida Ka. Pengelolaan Sampah**



Sumber : DLH Kota Batam Bag. Pengelolaan Persampahan

#### 4. Keamanan

##### Mengadakan Ruang Masyarakat

Pemerintah dalam melakukan pembinaan harus menjamin keamanan dari masyarakat binaannya. Keamanan yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah memberikan rasa aman, kepercayaan, dan keterbukaan dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai

bagian dari OPD yang berwenang menyatakan bahwa hal terkait keamanan masih tergolong sulit untuk direpresentasikan karna satu dan lain hal yang menghambatnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam berharap masyarakat bisa bekerjasama untuk mematuhi dan menjalankan rangkaian program yang telah dibuat untuk keberhasilan kebijakan dalam rangka pengurangan sampah wilayah perkotaan. Terciptanya ruang diskusi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan agar nantinya terjalin komunikasi dua arah yang jelas dan sesuai dengan harapan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rida selaku Ibu Nanda selaku Sekretaris Kepegawaian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. *“DLH memberi wadah aspirasi dengan turun langsung ke lapangan berjumpa dengan masyarakat. Tentu harapan kami masyarakat bisa mengerti kalau kebijakan akan sulit berhasil jika mereka tidak sama-sama ikut serta berpartisipasi. Melalui hal ini diharapkan aspek keamanan yang dimaksud bisa sedikit demi sedikit terwujud”*. (Wawancara 7 Februari 2023).

**Gambar 3. 6 Pemerintah Menyediakan Ruang Diskusi Publik**





Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, 2022

Oleh sebab itu, meskipun belum dapat berjalan sepenuhnya dengan baik dan sesuai tujuan awal Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terus mengupayakan agar masyarakat bisa menjadi pelindung bagi lingkungannya sendiri dengan cara mentaati peraturan yang berlaku agar menciptakan keamanan dalam pembinaan yang sedang digencarkan kepada masyarakat.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti memberikan suatu kesimpulan terkait Upaya Pemerintah Kota Batam dalam Membina Masyarakat terkait Pengelolaan Sampah Wilayah Perkotaan Tahun 2020-2022. Adapun kesimpulan tersebut ialah upaya Pemerintah Kota Batam dalam pembinaan masyarakat adalah sebagai pembuat kebijakan dan program pengelolaan sampah seperti sosialisasi dan edukasi. Namun aspek keamanan belum dapat dihadirkan oleh DLH secara optimal disebabkan oleh kurangnya tingkat partisipasi masyarakat.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran yaitu dalam melakukan koordinasi DLH Kota Batam harus

memperhatikan faktor tujuan yang perlu diketahui bentuknya, keahliannya, cara yang diberikan, waktu dan tempat pelaksanaan. Sehingga dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih.

### Daftar Pustaka

#### A. Media Online

- Aris. (2019). Batam Hasilkan 200 Ton Sampah Plastik per Hari. *Batampos.Co.Id*. Retrieved from <https://batampos.co.id/2019/12/24/batam-hasilkan-200-ton-sampah-plastik-per-hari/>
- Sianturi, R. U. (2021). World Cleanup Day 2021, DLH Batam Gelar Gerakan Pilah Sampah. *TribunBatam.Com*. Retrieved from <https://batam.tribunnews.com/2021/09/18/world-cleanup-day-2021-dlh-batam-gelar-gerakan-pilah-sampah>
- Sitanggang. (2021). Banyak Sampah di Sungai, FMPL Batam Minta DLH Turun ke Sagulung. *TribunBatam.Com*. Retrieved from <https://batam.tribunnews.com/2021/08/21/banyak-sampah-di-sungai-fmpl-batam-minta-dlh-turun-ke-sagulung?page=1>
- Sultan. (2021). Pengangkut Sampah Banyak yang Rusak, DLH akan Tambah 5 Armada. *Batampos.Co.Id*. Retrieved from [https://metropolis.batampos.co.id/pengangkut-sampah-banyak-yang-rusak-dlh-akan-tambah-5-armada/?\\_gl=1\\*bc2qa0\\*\\_ga\\*ODc4MTk2NDE5LjE2ODk3NzQzNzI.\\*\\_ga\\_J67S7D4JHG\\*MTY4OTc3NDM3MS4xLjEuMTY4OTc3NDQ1OC42MC4wLjA.&\\_ga=2.226420954.1982771503.1689774374-878196419.1689774372](https://metropolis.batampos.co.id/pengangkut-sampah-banyak-yang-rusak-dlh-akan-tambah-5-armada/?_gl=1*bc2qa0*_ga*ODc4MTk2NDE5LjE2ODk3NzQzNzI.*_ga_J67S7D4JHG*MTY4OTc3NDM3MS4xLjEuMTY4OTc3NDQ1OC42MC4wLjA.&_ga=2.226420954.1982771503.1689774374-878196419.1689774372)
- Wardah. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga

Kebersihan Lingkungan.  
*Kompasiana.Com*. Retrieved from  
<https://www.kompasiana.com/53wardah2243/619b93d406310e07f7065a62/meningkatkan-kesadaran-masyarakat-dalam-menjaga-kebersihan-lingkungan>

Yanti, Devi Kristina. (2018). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Good Governance. *Kompasiana.Com*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/kristina-delvi/5bfd0f1143322f2d2d6011e2/partisipasi-masyarakat-didalam-good-governance>

## B. Jurnal

Affandi, A., A. Ma'ruf. (2015). Peran Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bulukamba. *Jurnal Otoritas* 5 (2): 56-60

Aprimawanti, B. (2016). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 42 (2): 25-36

Aziz, F., R. Yulianti., M. Yusuf. (2021). Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah di Kota Serang. *Jurnal Administrasi Publik JAP* 12 (2): 29-34

Dwiyanto, Bambang Munas. (2019). Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Publikasi Ilmiah*

*UMS* 16 (1): 21-25

Purwaningrum, Pramiati. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lingkungan Indonesia. *Journal of Urban and Environmental Technology* 8 (2): 141-147

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan.

PP 101 tahun 20014 tentang pengelolaan limbah B3.

Undang-undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

## D. Buku dan E-Book

I Nyoman Sumaryadi. (2006). *Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia.

Rendy Adiwilaga. (2018). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia: Teori dan Prakteknya*. Jakarta: Deepublish.

Hamja. (2015). *Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections*. Jakarta: Deepublish.

Sihadi Darmo, Henita Rahmayanti. (2021). *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit NEM.